



Pengaruh Skandal Politik Terhadap Kepercayaan Publik dan Kinerja Pemerintah di Indonesia

Aditama Putra Maulana^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹aditamaputraa@gmail.com

* aditamaputraa@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-30

Kata Kunci:

Ethics;

Politics;

Scandal;

ABSTRAK

Government ethics encompass issues of honesty and transparency in governance. Government ethics must be upheld by elite public officials and government staff. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This decision has sparked controversy and conflict in Indonesia because it is considered to involve political interests. The public questions the family ties between Constitutional Court Chief Justice Anwar Usman, who is President Jokowi's brother-in-law or Gibran's uncle. Based on the background of conflict and alleged political interests related to the Constitutional Court's ruling on the age limit for vice presidents, the relevant problem formulation is: what is the impact of the political scandal of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023? Qualitative research focuses on gaining an in-depth understanding of social phenomena through document analysis to gather information. The research results reveal that the constitution can be manipulated by politics and the judiciary can be pressured to facilitate political interests.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintah akan berjalan dengan lebih baik.¹ Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan. Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdikan pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdian dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan (*The use of power*). Dalam etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat. Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, Pemerintah yang beretika akan menciptakan berbagai dampak positif bagi masyarakat dan negara. Pemerintah yang beretika akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena mereka menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kepercayaan ini penting untuk stabilitas politik dan sosial.

¹ Ismail Nurdin, 2017, Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 13.

Etika sering disamakan artinya dengan moral. Akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya. Nugroho (2000) menyatakan bahwa moral adalah ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendiri suatu ajaran tentang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk.²

Selain itu, Magnis Suseno (1987) menyatakan etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral sifatnya operasional, artinya langsung mengajarkan orang bagaimana harus hidup baik. Ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan apa yang bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral, dengan kata lain etika adalah ilmu yang kritis. Etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.

Baru-baru ini kita semua disuguhkan pemberitaan media tentang pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan boleh berkampanye politik dan boleh memihak terhadap pilihan politiknya. konstitusi telah menggariskan secara tegas bahwa Jokowi harus menjalankan dengan selurus-lurusnya dan setegak-tegaknya terhadap konstitusi, undang-undang, dan seluruh peraturannya sebagai seorang Presiden. kalangan ahli/akademisi juga mengkritik keras terhadap pernyataan Presiden Jokowi karena dianggap melanggar etika dan moral, serta tidak bisa menunjukkan sikap netral dalam Pemilu 2024 yang tentu berimplikasi terhadap masa depan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Selama dua periode memimpin Indonesia, para ekonom sepakat bahwa Presiden Joko Widodo berhasil memperbanyak infrastruktur dan gencar menggaet investasi. Namun warisan Jokowi di bidang pembangunan itu harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat "peringatan keras" dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024.³ Tujuan penelitian ini untuk menilai bagaimana skandal politik memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik. Sehingga penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk reformasi kebijakan dan praktik pemerintahan untuk mencegah atau mengatasi skandal politik di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan menggali lebih dalam melalui studi kasus untuk memahami persepsi dan opini publik. Pendekatan deskriptif menyediakan gambaran tentang bagaimana skandal politik mempengaruhi kepercayaan publik. Ketika sebuah skandal politik terjadi, terutama yang melibatkan tokoh penting seperti presiden, reaksi publik seringkali didasarkan pada bagaimana mereka memandang kejujuran, integritas, dan kemampuan pemimpin dalam menghadapi situasi tersebut melalui pengumpulan data sekunder dan penyajian hasil. Data sekunder yang digunakan media massa seperti majalah, dan situs berita daring yang melaporkan skandal politik dapat digunakan untuk analisis framing (bagaimana skandal dibingkai oleh media). Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu suatu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data non-numerik menjadi sebuah informasi atau tren yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam suatu perkembangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali persepsi publik terhadap dugaan skandal politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan ketidaknetralan pada pemilu Presiden dan Wakil

² Ibid, hlm. 5.

³ Nicky Aulia Widadio, 2024, Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si 'anak kandung reformasi' di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>, 09 Sept 2024.

Presiden. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Menghindari interpretasi subjektif atau bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Fokus pada apa yang diungkapkan oleh data dan bagaimana data tersebut mencerminkan persepsi dan opini publik secara akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Dalam studi politik tidak bisa dipisahkan dari diskursus tentang kekuasaan. Studi tentang sosiologi politik atau ilmu politik mau tidak mau harus membahas tentang bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, menggunakan dan kesadaran mengenai bagaimana cara mempertahankan. Kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan yang bagus. Oleh karena itu setiap orang akan berusaha memperoleh kekuasaan dengan cara mengejar posisi yang memungkinkan bisa meraih kekuasaan dan menggunakannya.⁴

Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayanan public.⁵

Secara empiris, sejak demokrasi liberal 1950 1959, hingga orde baru, birokrasi selalu menjadi korban permainan politik penguasa. Akibatnya, keberpihakan birokrasi terhadap golongan-golongan tertentu yang mendukung pihak berkuasa. Wujudnya, antara lain pemberian pekerjaan kepada orang-orang dekat pejabat publik, pemberian pelayanan kepada mayoritas masyarakat yang mendukung pada partai politik tertentu. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, maka sejumlah masyarakat berharap kembalinya birokrasi sebagai alat negara tidak kembali lagi. Pada era reformasi ini, masyarakat menginginkan kedudukan birokrasi sebagai institusi yang netral. Lembaga yang tidak berpihak kepada kelompok tertentu pada momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Selain itu, indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih (*good governance*), pemerintah yang bersih ditentukan tegaknya supremasi hukum, akuntabilitas dan profesionalitas, transparansi, keadilan dan partisipasi dalam pengelolaan kebijakan maupun layanan kepada masyarakat. Beberapa ketentuan yang dibuat pemerintah untuk menegaskan netralitas birokrasi antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No 5 dan 12/1999. Dalam PP itu diatur bahwa PNS untuk tidak masuk dan menjadi anggota partai politik dan Undang-Undang No 12/2003 tentang pemilihan umum.

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan boleh berkampanye politik dan boleh memihak terhadap pilihan politiknya. Pernyataan tersebut dinilai oleh para ahli dan akademisi bahwa Presiden Jokowi telah melanggar etika dan moral serta tidak dapat menunjukkan sikap netral.

⁴ Peter haris, foundations of political sciences, Singapore-Tokyo, Prentice hall, 1997, hlm. 5.

⁵ Ismail Nurdin, 2017, Etika Pemerintahan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm.11.

Netralitas seorang presiden sangat penting untuk mencegah abuse of power yang akan merusak tatanan pemerintahan dan berpotensi terhadap terganggunya sistem demokrasi dan hak sosial politik di Indonesia. Hal tersebut juga selaras dengan substansi Tap MPR VI/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang harapannya mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, membuktikan bahwa ada kepentingan politik Presiden Joko Widodo untuk mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat sebelum pemilu Presiden menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, agar dapat lolos sebagai calon wakil presiden. Seperti inilah ironi lain yang terjadi di negara/masyarakat kita. Seperti dapat kita saksikan bersama, sesungguhnya banyak di antara kita yang melakukan kejahatan, baik sosial atau politik, seperti kolusi, nepotisme, manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya yang dilakukan terang-terangan, dan jelas sangat merugikan banyak orang, seperti itu bukan suatu kejahatan. Paling tidak masyarakat kita mengalami ketakutan dan ketidakberdayaan untuk memperkarakannya. Berbeda dengan beberapa bangsa lain di Barat, persoalan itu justru merupakan salah satu sisi serius dari penyelenggaraan bermasyarakat/bernegara mereka. Siapa pun, jika terbukti melakukan kejahatan, apalagi sosial atau politik, seorang presiden atau senator pun tak urung bisa dimejahijaukan.

Hasrat berkuasa masih di atas segalanya dan Untuk kesekian kalinya terbukti bahwa kekuasaan itu menggiurkan, menggoda, dan memesona sehingga siapa saja selalu tertarik mendapatkannya. Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa kekuasaan menjadi magnet bagi manusia. Tidak hanya itu, dalam praktek pengelolaan politik formal kekuasaan selalu diperebutkan. Karena itu, sangat tepat bila kekuasaan selalu diposisikan sebagai sesuatu yang 'menggiurkan', 'menggoda', dan 'memesona' kepada siapa pun.⁶

Kekuasaan politik menurut Roger Scruton diartikan sebagai pelaksanaan politik seluruhnya seolah tidak ada faktor yang terlibat selain faktor kekuasaan, sehingga kelompok-kelompok tanpa kekuasaan tidak dipertimbangkan, dan mereka yang memiliki kekuasaan dipertimbangkan hanya pada batas kekuasaan yang mereka miliki.⁷

Andrew Heywood juga menguraikan tiga wajah kekuasaan dalam buku Politik: Pertama, kekuasaan sebagai pembuat keputusan. Wajah kekuasaan ini tersusun dari aksi-aksi sadar yang dalam sebagian cara memengaruhi isi keputusan-keputusan politik. Kedua, kekuasaan sebagai pengaturan agenda. Wajah kedua kekuasaan berupa kemampuan untuk mencegah keputusan yang sedang dibuat. Ini mencakup kemampuan untuk mengatur atau mengendalikan agenda politik, sehingga isu atau usulan yang tersampaikan. Ketiga, kekuasaan sebagai kontrol pemikiran. Wajah ketiga dari kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain dengan membentuk apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dibutuhkan oleh orang lain.⁸

Hasilnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo menurun. Ini merujuk pada temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024. Menurut survei terbaru Indikator, ada 76,6 persen responden yang cukup/sangat puas dengan kinerja Jokowi. Angka tersebut turun 2 persen dibandingkan dengan survei periode sebelumnya atau pada 12-

⁶ Muhtar Haboddin, 2017, Memahami Kekuasaan Politik, UB Press, hlm. 1.

⁷ Roger Scruton, 2013, Kamus Politik, Jogjakarta: Pustaka Belajar, hlm. 746.

⁸ Andrew Heywood, 2014, Politik, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 15.

13 Februari 2024.⁹ responden yang merasa kurang puas terhadap Jokowi beralasan bahwa bantuan untuk rakyat tidak merata. Presiden juga dinilai gagal memberantas korupsi. Selain itu, di era Jokowi, harga kebutuhan pokok dinilai meningkat, utang negara semakin tinggi, kinerjanya buruk, dan kurang berpihak kepada rakyat kecil. Ada pula yang menilai Jokowi membangun politik dinasti. Jika Jokowi dianggap sedang membangun dinasti kekuasaan, hal ini merujuk pada persepsi bahwa ia berupaya untuk memperluas pengaruh politiknya dengan melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan atau politik. Konsep ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang etika politik dan demokrasi. ciri dinasti politik diantaranya Mengikutsertakan anggota keluarga dalam pemilihan umum atau pengangkatan jabatan publik, pemanfaatan jaringan politik keluarga untuk memperkuat posisi politik, serta kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkup keluarga.

Keleluasaan Jokowi mengacak-acak cita-cita Reformasi 1998 terjadi akibat partai-partai hanya memikirkan perut sendiri. Alih-alih memimpin oposisi, Prabowo Subianto menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019. Dalih rekonsiliasi menyembuhkan polarisasi tersebut dua pemilu menjadi alasan yang dipakai keduanya membangun koalisi ganjil tersebut. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi diikuti partai-partai lain. Koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi membuat ia leluasa merangkul dan memiting lawan politiknya. Partai-partai yang haus kekuasaan kemudian berlomba melayani keinginan Jokowi memereteli dan melumpuhkan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan. Partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat setuju ketika Jokowi mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman. Jokowi bahkan terang-terangan memakai lembaga hukum menggebuk lawan politik yang tak sejalan dan mencegah sekutu membelot. Dukungan Golkar terhadap Gibran Rakabuming Raka terjadi karena Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tersandera kasus korupsi minyak goreng dan dugaan penyalahgunaan subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penyelidikan Kejaksaan Agung membuat Golkar sukarela menjadi kendaraan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ia kader PDI Perjuangan.¹⁰

Puncaknya pada bulan Agustus telah terjadi demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Kejadian tersebut sukses menarik perhatian dunia internasional. Selain dibahas di media sosial warga luar negeri, aksi ribuan massa di depan DPR itu juga sukses menyita media internasional. Hal itu disorot akibat DPR yang berencana mengesahkan RUU Pilkada yang dibahas serba kilat, menjadi UU dalam Rapat Paripurna untuk memuluskan jalan Putra Presiden Jokowi, Kaesang Panggarep maju di Pemilihan Gubernur. Masyarakat marah dengan manipulasi yang sedang berlangsung terhadap sistem demokrasi negara Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kepentingan politik Presiden Joko Widodo dan ketidaknetralan dalam pemilihan presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Ketidaknetralan dalam pemilihan presiden dapat menyebabkan polarisasi politik dan sosial yang semakin mendalam. Hal ini dapat menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok politik dan pendukung mereka, memperburuk keretakan sosial, dan mengurangi rasa persatuan di masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya skeptisisme terhadap integritas pemilu, yang penting untuk

⁹ Fitria Chusna Farisa, 2024, Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Turun Jadi 76,6 Persen, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/12060191/survei-indikator-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-turun-jadi-766-persen>, 09 September 2024.

¹⁰ Tempo, Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi, <https://majalah.tempo.co/read/opini/170015/dinasti-politik-jokowi>, 09 September 2024.

memastikan legitimasi hasil pemilihan dan stabilitas politik, dan Ketidakpastian politik seringkali mengarah pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah tidak stabil atau korup, keputusan ekonomi strategis seperti investasi infrastruktur, reformasi regulasi, dan kebijakan fiskal dapat tertunda atau menjadi kurang efektif. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Heywood, 2014, Politik, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 15. t.t.

Apeldoorn, L. J. van, Oetarid Sadino, dan Supomo. *Pengantar ilmu hukum*. Cet. ke-15. Pradnya Paramita, 1978.

Hanafiih, Nur Shofa, dan Nabilah Apriani. "KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN." *SPEKTRUM HUKUM* 19, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35973/sh.v19i2.2839>.

Hukumonline, Tim. "Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat." *hukumonline.com*. Diakses 30 April 2023. <http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-1t6177da083c991/>.

Ismail Nurdin, 2017, Etika Pemerintahan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm.11. t.t.

Ismail Nurdin, 2017, Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 13. t.t.

Muhtar Haboddin, 2017, Memahami Kekuasaan Politik, UB Press, hlm.1. t.t.

Peter haris, foundations of political sciences, Singapore-Tokyo, Prentice hall, 1997, hlm. 5. t.t.

Roger Scruton, 2013, Kamus Politik, Jogjakarta: Pustaka Belajar, hlm. 746. t.t.

Tempo, Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi, https://majalah.tempo.co/read/opini/170015/dinasti-politik-jokowi, 09 September 2024. t.t.

WMA - The World Medical Association-WMA Declaration of Venice on End of Life Medical Care. t.t. Diakses 18 Oktober 2022. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-venice/.

Wulantiani, Riska. "Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup Pada Pasien Terminal State Dihubungkan Dengan Kewajiban Melindungi Hidup MakhluK Insani." Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2015. http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719.